



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR-RI

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN SOSIAL,
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)**

Rapat Ke : 10
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat/ke- : Rapat Kerja / ke- 10
Dengan : Menteri Sosial RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, **25 Januari 2017**
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum.**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA. 2016;
2. Isu-isu aktual
Hadir : orang dari 47 orang Anggota Komisi VIII DPR-RI

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib Pasal 251 ayat (2), Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja dipimpin oleh **Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Komisi VIII DPR RI sesuai acara tersebut diatas.

3. Rapat Kerja VIII DPR RI dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan paparan oleh Menteri Sosial RI dan tanya jawab oleh anggota Komisi VIII DPR RI.
4. Rapat di skors pukul 14.05 WIB dan dibuka kembali oleh Ketua Rapat pada pukul 15.10 WIB, serta dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Jawaban dari Menteri Sosial RI serta tanggapan Anggota Komisi VIII DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda “**Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2016 dan Isu-isu Aktual**”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2016 atas capaian dan target sasaran sesuai penyerapan anggaran sebesar Rp 12.298.006.170.000 (*Dua belas triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) atau 97,97% dari pagu anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2016 Rp13.496.355.658.000,- (*Tiga belas triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI memahami usulan tambahan jangkauan untuk perluasan program tahun 2017 untuk Program Keluarga Harapan (PKH) melalui APBN-P Tahun Anggaran 2017 dengan tambahan target sebanyak 1.000.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga Tahun 2017 dapat menjangkau sebanyak 7.000.000 KPM, anggaran yang diperlukan sebesar Rp1.107.300.000.000,- (*satu triliun seratus tujuh miliar tiga ratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut: Bantuan Sosial Rp945.000.000.000,- (*sembilan ratus empat puluh lima miliar rupiah*) dan *Safeguarding* Rp162.300.000.000,- (*seratus enam puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah*).

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI untuk menyampaikan rincian usulan tambahan perluasan program tahun 2017 dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman pada saat membahas APBN-P Tahun 2017.

3. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016, maka Komisi VIII DPR RI memandang perlu adanya kebijakan perluasan jangkauan program dan kegiatan melalui penambahan anggaran dalam APBN-P Tahun Anggaran 2017, antara lain untuk program dan kegiatan yang mencakup:
 - a. Pengembangan Taman Makam Pahlawan (TMP) baik alokasi anggarannya maupun target sasaran serta manfaatnya.
 - b. Penyelesaian penerima kompensasi bagi korban eksodus Timor-Timur Non NTT yang belum mendapatkan haknya.
 - c. Perluasan program Sarana Lingkungan (Sarling), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara.
 - d. Peningkatan Tunjangan Kinerja (Tunkin) untuk mendukung upaya meningkatkan capaian target kinerja dalam rangka optimalisasi dan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan.
 - e. Inventarisasi aset Kementerian Sosial RI dan pemanfaatannya dioptimalkan untuk mendukung program dan kegiatan.

Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI untuk menyusun usulan tambahan perluasan program tahun 2017 dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman.

4. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan:
 - a. Verifikasi dan validasi data yang benar-benar akurat sehingga dapat untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran.
 - b. Pelayanan pusat pengaduan (call center) bagi anak korban kekerasan, kesejahteraan sosial keluarga dan program unggulan lainnya yang membutuhkan respon cepat dan bersentuhan langsung dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - c. Penambahan dan penyaluran bantuan mobil pelayanan sosial di daerah sesuai target program.
 - d. Percepatan pemulangan WNI migran terutama akibat tindak pidana perdagangan orang, over stay, dan WNI yang tidak memiliki dokumen lengkap dan dalam upaya mengurangi TKI ilegal bekerjasama dengan aparat kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

5. Komisi VIII DPR RI mendorong Menteri Sosial RI meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan merespon serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI atas berbagai program dan kegiatan Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan di daerah.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.50 WIB.

Jakarta, 25 Januari 2017

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI,
KETUA,**

Ttd.

Dr. H.M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.

andreas	<ul style="list-style-type: none">• terkait bidang legislasi pembahasan RUU yang menjadi prioritas prolegnas adalah RUU BI dan RUU Perbankan namun dengan akan disahkannya RUU PPKSK seharusnya prioritas pembahasan RUU adalah perubahan RUU BI, perubahan RUU OJK dan perubahan RUU LPS, setelah itu baru melakukan pembahasan RUU Perbankan• penegasan apakah seluruh perbankan menjadi mitra Komisi XI• sesuai dengan ketentuan UU BI, perlu dilakukan rapat kerja dengan BI setiap triwulan.• mengusulkan agar diagendakan rapat kerja untuk membahas holding BUMN
---------	--

m. hatta	<ul style="list-style-type: none">• ..• mengusulkan kunker spesifik ke Jawa Tengah, Sumatera Utara•
A. Hatari	<ul style="list-style-type: none">• mengusulkan kunker spesifik ke Maluku Utara• mengusulkan agar mengundang Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat dan Gubernur Aceh untuk mempresentasikan Dana Otonomi Khusus
	<p>Rapat Intern menetapkan kunker spesifik tanggal 14 – 16 April 2016 ke Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Rapat Intern menyetujui untuk RDP tentang Dana Otonomi Khusus Rapat Intern menyetujui untuk RDP tentang Dana Bagi Hasil = Jawa Timur, Papua Barat</p> <p>Kunker Reses ke Provinsi Jambi, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Barat (Cadangan Provinsi Kepri, Provinsi Jatim dan Provinsi Kalsel) berupa sidak atau kunjungan lapangan.</p>
Anna M	<ul style="list-style-type: none">• mengusulkan agar RUU Perbankan disusun dan dibawa ke Paripurna untuk dilakukan pembahasan.• mengusulkan RUU PNBK dapat dibahas pada masa sidang IV
	<ul style="list-style-type: none">•